



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Reformasi membawa dampak terhadap berbagai bidang kehidupan dan pemerintahan di Indonesia, salah satu dampak dari reformasi adalah bergulirnya otonomi daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang tersebut mengatur kewenangan-kewenangan yang melekat pada daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri dalam beberapa bidang, sebagaimana tertuang pada Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa 'Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintahan'.

Otonomi daerah membuka peluang yang besar terhadap partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah salah satunya dalam bidang pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan diwujudkan melalui pelibatan elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan hal mana di salurkan melalui Dewan Pendidikan.

Dewan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. Mengacu pada aturan tersebut, jelas bahwa partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dimanifestasikan melalui Dewan Pendidikan.

Pembentukan Dewan Pendidikan diharapkan dapat memacu spirit pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini selaras dengan konsep dasar manajemen berbasis sekolah (*school-based*

management) dimana bertujuan untuk *me-redisain* pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah yang mencakup guru, siswa, kepala sekolah, orang tua siswa dan masyarakat (Nanang Fatah, 2004: 9).

Kabupaten Bandung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang konsen terhadap peningkatan mutu pendidikan, hal tersebut tertuang dalam misi Kabupaten Bandung yakni ‘meningkatkan kualitas SDM dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta memantapkan kesalehan sosial berlandaskan iman dan taqwa’.

Untuk mendukung tercapainya misi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai instansi yang membidangi masalah pendidikan mengejawantahkannya dalam visi terselenggaranya layanan prima pendidikan dalam membentuk insan kamil yang mengedepankan nilai-nilai budaya lokal dengan berorientasi global. Untuk mencapai visi tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung menurunkannya kedalam misi: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (2010:3), antara lain:

1. Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan
2. Meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan
4. Meningkatkan kesetaraan memperoleh layanan pendidikan
5. Meningkatkan kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan
6. Meningkatkan tata kelola, transparansi, akuntabilitas dan pencitraan publik yang baik
7. Melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan nilai-nilai budaya lokal meliputi aspek estetika, etika, logika dan historika untuk membentuk karakter bangsa

Dalam mendukung ketercapaian visi diatas, harus ada kerjasama antar berbagai pihak yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan di implementasikan melalui pembentukan Dewan Pendidikan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung, ‘Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang

beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli dan berperan serta dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan’.

Akan tetapi, pengelolaan pendidikan dalam prakteknya bukanlah pekerjaan yang mudah dalam arti banyak kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pengelolaan sistem pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dengan asas desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah ternyata belum semuanya berjalan mulus, hal tersebut sebagai akibat dari belum siapnya daerah dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan yang selama ini berbentuk sentralistik atau terpusat.

Sobri, dkk (2009:1) mengemukakan bahwa salah satu kelemahan dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah lemahnya manajemen, mulai dari manajemen pengelolaan, manajemen kepemimpinan, manajemen pembelajaran dan sebagainya yang mana kelemahan tersebut berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran.

Hal tersebut diperkuat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Budimansyah dalam kegiatan “Workshop Bantuan Sosial Dewan Pendidikan” yang dilaksanakan di Hotel Garden Permata Jl. Lemahneundeut No. 7 Setrasari, Bandung pada tanggal 5 Juni 2012. Dalam makalahnya yang berjudul “Fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan”, Budimansyah mengemukakan bahwa, hingga saat ini berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti (tersedia dalam www.dikdas.kemdikbud.go.id, diakses tanggal 8 September 2012)

Berdasarkan pengamatan dan analisis yang selama ini dilakukan, menurut Budimansyah (tersedia dalam www.dikdas.kemdikbud.go.id, diakses tanggal 8 September 2012) setidaknya terdapat tiga faktor penyebab peningkatan mutu pendidikan belum merata di berbagai daerah. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pendidikan nasional yang menggunakan pendekatan *education production function* atau yang lebih dikenal dengan pendekatan *input-output analysis*, tidak dilaksanakan secara konsekuen karena masih memusatkan pada input pendidikan dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan.

2. Penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratis-sentralistik yang membuat sekolah sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang.
3. Partisipasi warga sekolah, guru dan masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi masyarakat selama ini, masih terbatas hanya pada dukungan dana, sedangkan dukungan-dukungan lain seperti pemikiran, moral, barang dan jasa kurang diperhatikan.

Untuk menghadapi berbagai kendala yang disebutkan di atas, menurut penulis dapat diupayakan dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Dewan Pendidikan sebagai *stakeholder* pendidikan yang turut mempercepat upaya peningkatan mutu pendidikan secara merata. Keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah menjadi sangat penting ditengah otonomi daerah yang disertai dengan desentralisasi pendidikan, dimana dalam otonomi daerah masyarakat dianggap lebih mengetahui permasalahan dan kebutuhan mereka sendiri, oleh karena itu masyarakatlah yang menjadi pondasi kokoh dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai eksistensi Dewan Pendidikan di Kabupaten Bandung, dibawah ini adalah data program kerja Dewan Pendidikan Kabupaten Bandung tahun 2011.

Tabel 1.1
Program Kerja dan Kegiatan Dewan Pendidikan
Kabupaten Bandung Tahun 2011

No	Nama Kegiatan	Realisasi
1	Pembahasan program kerja	4 Januari 2011
2	Sinkronisasi program kerja Dewan Pendidikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung	11 Januari 2011
3	Pembahasan PP tentang Komite Sekolah	14 Januari 2011
4	Rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung	18 Januari 2011
5	Pembahasan UN dan USBN 2011	25 Januari 2011

6	Pembahasan PPBD 2011	5 Februari 2011
7	Rapat Koordinasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan CSR	7 Februari 2011
8	Penyusunan materi Pemberdayaan Komite Sekolah dan sosialisasi Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan	8 Februari 2011
9	Kegiatan Pemberdayaan Komite Sekolah dan sosialisasi Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan	22 Februari 2011
10	Rapat sinkronisasi program kerja Dewan Pendidikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung	1 Maret 2011
11	Rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung	8 Maret 2011
12	Rapat koordinasi Dewan Pendidikan dengan DPRD Komisi D Kabupaten Bandung	10 Maret 2011
13	Rapat koordinasi Dewan Pendidikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung tentang PPBD	15 Maret 2011
14	Rapat koordinasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan CSR	22 Maret 2011
15	Rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dinas Jakarta	29 Maret 2011
16	Penerbitan majalah "Rawayan" edisi 2	5 April 2011
17	Publikasi kegiatan Dewan Pendidikan di media massa	4 Oktober 2011
18	Pengkajian keterlaksanaan KTSP di Kabupaten Bandung	29 November 2011

19	Penjajagan data base Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung	5 Desember 2011
----	--	-----------------

Sumber : Laporan Kegiatan dan Pertanggungjawaban Dewan Pendidikan Kabupaten Bandung Tahun 2011

Melihat data dan fakta sebagaimana telah penulis kemukakan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti sejauh mana peran dewan pendidikan di era otonomi daerah. Relevansi antara masalah yang akan diteliti dengan kajian pendidikan kewarganegaraan terletak pada implementasi pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam kerangka otonomi daerah, karena sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan otonomi daerah belum berjalan secara efektif terutama dalam hal keterlibatan warga negara dalam pemerintahan.

Pendapat di atas, senada dengan Branson (1999:4) yang mengartikan *civic education* dalam demokrasi merupakan pendidikan untuk mengembangkan dan memperkuat pemerintahan otonom (*self government*). Pemerintahan otonom mengandung arti bahwa warga negara aktif terlibat dalam pemerintahannya sendiri, yakni masyarakat tidak hanya didikte orang lain atau memenuhi tuntutan orang lain melainkan melaksanakan apa yang diyakini sebagai sebuah keharusan. Karena itu, penulis mengangkat permasalahan tersebut kedalam suatu penelitian dengan judul “**Sistem Pengelolaan Pendidikan dalam Otonomi Daerah di Kabupaten Bandung** (Studi Deskriptif terhadap Dewan Pendidikan Kabupaten Bandung)”.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian penulis adalah bagaimana sistem pengelolaan pendidikan dalam otonomi daerah di Kabupaten Bandung?.

2. Rumusan Masalah

- a. Kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Bandung dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bandung.
- b. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Bandung?
- c. Hambatan apa yang dihadapi oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Bandung dalam meningkatkan mutu pendidikan di era otonomi daerah?
- d. Upaya apa yang dilakukan Dewan Pendidikan Kabupaten Bandung untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang timbul dalam peningkatan mutu pendidikan di era otonomi daerah?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai sistem pengelolaan pendidikan dalam otonomi daerah di Kabupaten Bandung.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Bandung dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bandung.
- b. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Bandung.
- c. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Bandung dalam meningkatkan mutu pendidikan di era otonomi daerah.
- d. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dewan Pendidikan Kabupaten Bandung untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang timbul dalam peningkatan mutu pendidikan di era otonomi daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan keilmuan dalam bidang pendidikan kewarganegaraan, khususnya dalam bidang kebijakan publik dan sistem pemerintahan daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Diketuainya kebijakan yang dikeluarkan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Bandung dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bandung.
- b. Diketuainya partisipasi masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Bandung.
- c. Diketuainya hambatan yang dihadapi oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Bandung dalam meningkatkan mutu pendidikan di era otonomi daerah.
- d. Diketuainya upaya yang dilakukan Dewan Pendidikan Kabupaten Bandung untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang timbul dalam peningkatan mutu pendidikan di era otonomi daerah.

E. Struktur Organisasi Skripsi

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan rasional yang menjelaskan pentingnya penelitian ini dilakukan. Isi dari bab ini meliputi; a) latar belakang penelitian, b) identifikasi dan rumusan masalah, c) tujuan penelitian, d) manfaat penelitian dan e) struktur organisasi skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, merupakan gambaran berbagai konsep, generalisasi dan teori yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian. Isi dari bab ini meliputi; a) tinjauan umum Dewan Pendidikan, b) hakikat otonomi daerah, dan c) tinjauan umum pengelolaan pendidikan dalam kerangka otonomi daerah

Bab III Metodologi Penelitian, merupakan penjelasan yang rinci mengenai metode penelitian yang digunakan. Isi dari bab ini meliputi; a) lokasi dan subjek penelitian, b) desain penelitian dan justifikasi penggunaan desain tersebut,

c) metode penelitian dan justifikasi penggunaan metode tersebut, d) definisi operasional yang dirumuskan untuk setiap variabel, e) instrumen penelitian, f) teknik pengumpulan data, dan g) teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan gambaran data yang diperoleh dari lapangan untuk kemudian dianalisis menggunakan berbagai teori sebagaimana telah dikemukakan di bab II. Isi dari bab ini meliputi gambaran umum hasil penelitian dan analisis hasil penelitian

Bab V Kesimpulan dan Saran, merupakan jawaban dari hasil penelitian yang telah dianalisis pada bab IV yang secara singkat menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran sebagai penutup hasil penelitian.